

BAB I

PENDAHULUAN

2.3 Latar Belakang Masalah

Food and Agriculture Organization (FAO) adalah Organisasi Internasional yang berdiri pada 16 Oktober 1945 yang dibentuk oleh *United Nations* atau yang dikenal dengan PBB dengan maksud untuk menyelesaikan masalah pangan dan pertanian. Pembentukan Organisasi tersebut dilatarbelakangi oleh penurunan produksi pangan pada masa Perang Dunia yang menyebabkan terganggunya perdagangan dan distribusi produk hasil pertanian di berbagai wilayah hingga menuai isu krisis pangan global. Sehingga berdirinya FAO dimaksudkan untuk memimpin upaya internasional dalam rangka mengatasi kelaparan. Pentingnya FAO dalam membantu negara-negara adalah ikut serta mengupayakan tingkat ketahanan pangan yang tinggi dan memastikan agar setiap individu mendapatkan akses terhadap makanan yang berkualitas tinggi untuk mencukupi individu tersebut dalam menjalani kehidupan yang aktif dan sehat (Nations, Food and Agriculture Organization of the United, 2023).

Fungsi FAO sejatinya meliputi analisa dan publikasi informasi yang luas yang mencakup nutrisi, pangan, pertanian, perikanan yang mencakup hasil laut, dan kehutanan termasuk hasil hutan primer (Office, 2016). Ketergantungan negara dalam memenuhi sumber daya melalui interaksi sistem Internasional menghasilkan sebuah hubungan interdependensi. Sehingga kaitan FAO dengan negara yaitu bekerjasama bersama pemerintah dalam membantu suatu negara dengan cara memberikan saran terhadap kebijakan yang berkaitan dengan fungsi tersebut. FAO juga dapat memberikan bantuan yang sifatnya teknis kepada negara-negara anggotanya atas permintaan anggota. FAO membahas seluruh rantai makanan dari produksi kemudian konsumsi. FAO memiliki peran sebagai forum netral yang membahas serta menyusun adanya kebijakan pangan, pertanian, serta yang terpenting adalah penghapusan kelaparan, kelangkaan pangan, dan kekurangan gizi.

Kaitan antara FAO dengan negara-negara sangat erat yang ditunjukkan dengan diberdirikannya FAO adalah semata-mata untuk mengatasi permasalahan bidang pangan dan pertanian yang mengganggu stabilitas pangan setiap negara. Fokus pembentukan FAO sebagai Organisasi Internasional ada pada kesejahteraan pangan setiap negara. Sehingga negara yang

tergabung ke dalam organisasi tersebut akan diberikan perhatian khusus terkait urusan ketahanan pangan yang diupayakan sebagai kepentingan nasional tiap-tiap negara. Kemudian, FAO memiliki mandat yang cukup besar untuk membantu negara-negara dalam penyelesaian masalah dan isu-isu kelaparan serta segala problematika yang bersumber dari ketahanan pangan serta berkaitan dengan kelangsungan hidup setiap individu. Taraf kesejahteraan dan ketahanan pangan yang baik adalah cita-cita dari setiap negara yang dalam upaya mewujudkannya dibantu oleh FAO sebagai forum organisasi netral dunia yang memiliki tanggungjawab penuh atas ketahanan pangan dunia. Sejalan dengan yang disebutkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's) nomor dua yaitu *Zero Hunger* atau mengakhiri kelaparan yang merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan, aspek ketahanan pangan menjadi isu yang penting untuk dibahas oleh negara-negara. Oleh sebab itu, FAO menjadi forum sekaligus menjalankan fungsi Organisasi Internasional yang menjadi arena kerjasama negara-negara dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut.

FAO memperhatikan negara-negara yang memiliki ketahanan pangan rendah yang mengarah pada kelaparan dan krisis pangan. Salah satu negara yang dinyatakan sebagai negara termiskin dengan tingkat kelaparan tinggi yang ikut serta menyita perhatian FAO yaitu Sudan Selatan. Sudan Selatan (South Sudan) adalah salah satu negara yang berada di benua Afrika, yang berbatasan langsung dengan Sudan, Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Etiopia, Uganda dan Kenya. Sudan Selatan merupakan negara yang memperhatikan kesejahteraan manusia yang dibuktikan dengan beberapa kali mencantumkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam setiap konstitusi yang pernah berlaku di negaranya. Pada tahun 2005, Sudan Selatan sempat berada di waktu-waktu terdesak yang mengharuskan negara Sudan Selatan membuat konstitusi sementara yang dinamakan "*the Interim Constitution of Southern Sudan*" (Constitute Project, 2016). Selain menitikberatkan pada desentralisasi dan pembagian wilayah otonom Sudan Selatan, pada konstitusi tersebut secara jelas disebutkan bahwa pemerintah Sudan Selatan bertekad untuk menegakkan nilai-nilai *humaniter* dan kesetaraan hak pria dan wanita. Nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi tersebut diupayakan dengan cara mengedepankan *human security* yang salah satunya menjadi tantangan berat bagi Sudan Selatan yaitu mengenai ancaman ketahanan pangan.

Pada kenyataannya, ketersediaan makanan yang cukup di dunia belum tentu dapat menutupi isu kelaparan yang masih dialami beberapa negara miskin. Sudan Selatan merupakan salah satu negara yang masih memiliki permasalahan global yang buruk yang berkaitan dengan

krisis pangan (Johnson, 2014). Kondisi negara tersebut sulit mengalami perubahan sehingga berdampak kepada pertumbuhan yang lambat atau disebut juga dengan *undeveloped country*. Konflik yang terjadi di Sudan Selatan menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi krisis pangan yang kemudian menyebabkan Sudan Selatan membutuhkan bantuan kemanusiaan bagi warga negaranya. Kondisi ketahanan pangan di Sudan Selatan yang sangat memprihatinkan berhasil menarik perhatian dari FAO sebagai Organisasi Internasional.

Belum selesai kesengsaraan warga negara Sudan Selatan akibat konflik dan kelaparan, tahun 2020 hingga 2021 ditetapkan menjadi tahun lahirnya ancaman baru terhadap ketahanan pangan negara-negara yang berdampak terjadinya krisis pangan global akibat pandemi covid-19 yang belum dapat diperkirakan kapan akan berakhir. Sehubungan dengan pencegahan perluasan wabah dan jumlah angka persebaran covid-19 yang *massive* maka tatanan pemerintahan dunia mengeluarkan kebijakan *lockdown* yang ditaati oleh lebih dari setengah negara di dunia yang terjangkit covid-19, tidak terkecuali Sudan Selatan. Memasuki tahun 2020 Sudan Selatan mengkonfirmasi kemunculan pertama pada kasus covid-19 di pada Minggu, 5 April 2020 oleh warga Ethiopia yang sedang melakukan perjalanan ke Sudan Selatan. 8,3 juta dari total penduduk Sudan Selatan yaitu 11,19 juta membutuhkan bantuan kemanusiaan yang didalamnya terdapat permintaan bantuan pangan. Karantina di beberapa wilayah dunia mengakibatkan sejumlah permasalahan baru dimana salah satunya yaitu kemunculan opsi yang mengharuskan ketersediaan pangan dalam jumlah besar di Sudan Selatan. Food and Agriculture Organization (FAO) sebagai Badan Pangan Dunia menjalankan kewenangannya dengan memberi peringatan kepada negara-negara bahwa covid-19 berdampak kepada kelumpuhan sektor perekonomian yang memicu krisis pangan global pada bulan April-Mei 2020 yang satu diantaranya adalah Sudan Selatan (IPB, 2020).

2.3 Rumusan Masalah

Penelitian ini memaparkan kondisi kelaparan di Sudan Selatan yang memicu terjadinya krisis pangan di Era Pandemi Covid-19. Kehadiran *Food and Agriculture Organization* (FAO) yang memiliki strategi ketahanan pangan memunculkan sebuah pertanyaan: Bagaimana upaya FAO dalam penanggulangan krisis pangan di Sudan Selatan sebagai dampak Pandemi Covid-19?

2.3 Kerangka Teoritik

Apabila ditinjau dari fenomena Pandemi Covid-19 yang memperburuk ketahanan pangan hingga terjadinya krisis pangan di Sudan Selatan, maka peneliti akan melakukan analisa dengan menggunakan satu teori dan dua konsep dalam menunjang sebuah penelitian yang bersifat ilmiah. Teori yang digunakan yaitu Teori Organisasi Internasional, serta konsep yang digunakan yaitu konsep ketahanan pangan dan konsep pembangunan berkelanjutan.

1. Teori Organisasi Internasional

Tidak dapat dipungkiri bahwa berdirinya sebuah negara tidak cukup untuk menyelesaikan problematika tatanan internasional. Thucydides pernah menulis tentang Perang Peloponesia yang berlangsung antara Sparta dan Athena dimana di dalamnya telah menggunakan teori organisasi internasional yang ditunjukkan dengan penerapan pola kerjasama, perundingan, aliansi, serta menyelenggarakan beberapa bentuk perjanjian yang menjadi kebutuhan dalam organisasi internasional (SCRIBD). Peperangan era Yunani Kuno tersebut diyakini memiliki sejarah organisasi internasional yang pertama kali terbentuk yaitu Amphictyonic League yang merupakan perkumpulan aktor-aktor Yunani Kuno dengan tujuan yang sama. Namun sejak perjanjian Westphalia pada tahun 1648 menandakan dimulainya kerjasama internasional dengan perkembangannya dewasa ini dengan sistem negara bangsa.

Le Roy A. Bannet seorang penulis buku "*International Organization: Principles and Issue*" memberi gagasan dalam bukunya bahwa organisasi internasional pada awal didirikannya hanya memiliki fungsi sebatas alat untuk mempertahankan peraturan-peraturan supaya tetap berjalan dengan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama sebagai wadah interaksi antar negara di dalam hubungan internasional (Bannet, 1991). Clive Archer mendefinisikan organisasi internasional sebagai struktur formal yang berkelanjutan yang pembentukannya berangkat dari sebuah perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh negara anggotanya dengan jumlah dua negara atau lebih yang berdaulat, memiliki tujuan yang sama dan berjanji mencapai tujuan tersebut secara bersama hingga terwujudnya kepentingan-kepentingan yang dicita-citakan (Satrio, 2008). Organisasi Internasional membagi peranannya menjadi tiga yaitu organisasi internasional sebagai sebuah instrumen, arena, dan aktor independen. Dalam menjalankan peranannya, perlu adanya analisa terhadap sebuah isu yang kemudian dieksplorasi sehingga organisasi internasional tersebut dapat diklasifikasikan sebagai inisiator, fasilitator, mediator, rekonsiliator, dan determinator.

Kepentingan nasional setiap negara mendorong terciptanya interaksi kerjasama di dalam tatanan internasional dengan aktor-aktor lainnya agar terciptanya kepentingan tersebut. Interaksi yang terjalin antar negara dalam tatanan internasional kemudian diberi wadah yang disebut dengan organisasi internasional. Kehadiran Organisasi Internasional bukan hanya mewadahi kepentingan negara-negara namun juga menjaga perdamaian dunia dengan membuka pintu kerjasama yang di dalamnya menekankan *collectivitas*, formalitas, dan *common interest* yang diwujudkan oleh anggotanya.

Food and Agriculture Organization (FAO) menjadi salah satu hasil implementasi dari teori organisasi internasional. Pembentukan FAO sebagai salah satu organisasi yang mengurus permasalahan pangan, pertanian, ketahanan pangan dan kelangkaan pangan dunia memiliki tujuan meningkatkan gizi dan standar hidup, meningkatkan produktivitas pertanian, memperbaiki kehidupan masyarakat dunia yang menunjang pertumbuhan ekonomi internasional (Sukma, 2018). Sejalan dengan dari konsep organisasi internasional, yaitu terciptanya interaksi di dalam tatanan sistem internasional, FAO menunjukkan keberadaannya dengan memberikan bantuan kepada negara-negara di dunia yang mengalami kelangkaan pangan, kesulitan akses pangan, dan ancaman krisis pangan seperti di negara Sudan Selatan. Upaya yang dilakukan FAO yaitu membantu Sudan Selatan bebas dari ancaman kelaparan dapat dianalisa menggunakan teori organisasi internasional.

FAO mengupayakan bantuan tersebut dalam bentuk teknis maupun non-teknis. Bantuan yang bersifat teknis diupayakan oleh FAO melalui bantuan pengiriman bahan baku pangan seperti gandum, kedelai, *shea butter*, dan berbagai kacang-kacangan lainnya yang menjadi bahan pokok di Sudan Selatan. Sedangkan bantuan yang bersifat non-teknis juga diperlukan, seperti pengadaan sosialisasi pembentukan koperasi sistem berkelanjutan pada sektor pertanian. Kemudian menunjukkan dukungannya kepada Sudan Selatan dalam bentuk kampanye internasional untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan melalui sosial media yang dimiliki FAO.

2. Konsep Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk menjalankan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kebutuhan pangan yang tercukupi dengan baik adalah hal yang esensial. Karena salah satu faktor sumber penunjang produktifitas manusia didapatkan dari asupan pangan yang baik. Penggunaan istilah ketahanan pangan sering kali menimbulkan perdebatan dikarenakan aspek ketahanan pangan sangat luas dan definisinya dapat bergeser dari periode ke

periode selanjutnya. Akan tetapi konsep ketahanan pangan merupakan konsep yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. FAO mencetuskan dasar-dasar ketahanan pangan pada Konferensi FAO di tahun 1984 dengan mengacu pada jaminan kecukupan serta ketersediaan pangan manusia. (Handewi Purwati Saliem, 2002) Terjaminnya setiap individu untuk dapat mendapatkan sumber pangan yang cukup dan merdeka dari setiap keterbatasan akses pangan akan menciptakan ketahanan pangan yang baik.

International Congress of Nutrition (ICN) menyempurnakan pemaknaan dari ketahanan pangan yang diselenggarakan di Roma pada tahun 1992. Ketahanan pangan dapat terwujud apabila setiap orang memiliki akses secara fisik maupun ekonomi terhadap kecukupan pangan dari waktu ke waktu dengan memperhatikan tingkat gizi yang sehat. Indikator ketahanan pangan dapat dilihat pada pangsa pengeluaran pangan yang dilakukan serta seberapa besar energi yang diperoleh untuk mengukur tinggi rendahnya ketahanan pangan. Pada dasarnya konsep ketahanan pangan dilandasi oleh ada atau tidaknya ketersediaan pangan seperti contoh yaitu pada ketahanan pangan sebuah negara dapat dilihat dari ketersediaan pangan dalam jumlah yang memadai bagi seluruh warga negaranya untuk dapat hidup secara aktif dan sehat.

Konsep ketahanan pangan dapat digunakan untuk menganalisa situasi pangan dalam beberapa tingkatan seperti global, nasional, regional, dan individu atau rumah tangga. Pada penerapannya, ketersediaan akses individu maupun rumah tangga terhadap ketahanan pangan berbanding lurus. Semakin mudahnya setiap manusia dalam memperoleh akses pangan maka tingkat ketahanan pangan tersebut juga semakin tinggi. Selain itu, ketahanan pangan juga sering dikaitkan dengan kestabilan harga pangan terskhusus jenis dan produk pangan pokok di suatu negara. Oleh karena itu, stabilitas pangan dalam sebuah negara menentukan baik buruknya ketahanan pangan di negara itu sendiri.

Kelaparan dan ancaman krisis pangan di Sudan Selatan dapat dianalisa menggunakan konsep ketahanan pangan dengan mengidentifikasi kondisi *food security* atau keamanan pangan negara tersebut. Konsep ketahanan pangan menyebutkan bahwa ukuran baik atau buruknya ketahanan pangan suatu negara dapat ditinjau melalui kemudahan akses warga negaranya dalam memperoleh pangan yang bergizi dengan waktu yang relatif lama. Sudan Selatan dapat dikatakan sebagai negara yang dilanda kelaparan dikarenakan warga negaranya sangat sulit mendapat akses makanan yang bergizi terlebih dalam waktu yang panjang. Kesengsaraan warga negara Sudan Selatan yang bergelut dengan kelaparan menjadi representasi ketahanan pangan di Sudan Selatan

yang berada dalam kategori sangat rendah. Kesulitan penduduk Sudan Selatan dalam beradaptasi dengan Pandemi Covid-19 memperburuk tingkat stabilitas ketahanan pangan Sudan Selatan.

3. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Malthus pada tahun 1798 mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris yang diakibatkan oleh ledakan jumlah penduduk yang sangat pesat. Pemikiran Malthus membawa keresahan pemikir-pemikir dunia yang memunculkan pendapat-pendapat baru dari para ahli mengenai pembangunan berkelanjutan. Hingga pada akhirnya terdapat terbitan buku publikasi pada 1972 yang berjudul “*The Limit to Growth*” oleh Donella H. Meadows dan Dennis Meadows sebagai bentuk perhatiannya terhadap pembangunan berkelanjutan. Buku tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. (Meadows, Meadows, & III, 1972) Pemahaman yang dapat diambil dari buku tersebut apabila dilakukan penelaahan yaitu pembangunan berkelanjutan akan mengarah kepada hubungan ketersediaan sumber daya alam dan pembangunan yang diupayakan. Keterbatasan sumber daya alam mempengaruhi arus barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan atau terus-menerus.

Konsep pembangunan berkelanjutan memiliki dasar kerangka pemikiran yang penyusunannya didasari oleh beberapa dimensi yang ada dalam kehidupan manusia seperti kelembagaan, ekonomi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan kelaparan. Pembangunan berkelanjutan sejatinya merupakan sebuah upaya pemerataan pembangunan antar generasi yang kaitannya pada masa kini maupun masa mendatang. Konsep pembangunan berkelanjutan juga mengharuskan terciptanya pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat serta menghadirkan kesempatan luas kepada setiap individu untuk mengejar cita-cita akan kehidupan yang lebih baik dengan tanpa mengorbankan kesempatan tersebut bagi generasi yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan seiring berjalannya waktu mengalami perkembangan. Kematangan cara berpikir terhadap konsep pembangunan berkelanjutan mengharuskan adanya pertimbangan kebutuhan yang wajar baik secara sosial maupun kultural. Seperti menentukan standar konsumsi yang berbeda yang disesuaikan dengan batas kemampuan lingkungan masing-masing.

Konsep pembangunan berkelanjutan diimplementasikan oleh UN ke dalam sebuah program pembangunan berkelanjutan yang bertaraf internasional yaitu *Sustainable Development Goals* (SDG's). SDG's memiliki tujuan yaitu perencanaan pembangunan dunia yang lebih baik dimana dampak positif atas keberhasilannya akan dirasakan oleh seluruh umat manusia dan bumi.

Salah satu fokus utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah mengakhiri kelaparan yang ditempatkan pada poin ke dua dalam SDGs yaitu “*Zero Hunger*” atau Tanpa Kelaparan. Kelaparan merupakan sebuah kondisi kekurangan konsumsi pangan kronik (Bappenas, 2023). Kelaparan kronik yang terjadi secara jangka panjang akan menimbulkan masalah baru terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tertentu. Kemungkinan terjadinya kelaparan dan kelangkaan gizi secara masiv dalam skala dunia disebabkan oleh sulitnya akses atau jalan untuk memperoleh pangan yang baik. Kondisi realistis dunia saat ini dimana sebagian dari masyarakat dunia telah dinyatakan mengalami kekurangan pangan secara kronis dikarenakan ketidakmampuan masyarakat dunia dalam memperoleh kecukupan pangan untuk memenuhi kebutuhan energi sehari-hari.

Perwujudan komitmen UN untuk mencapai keberhasilan SDGs “*Zero Hunger*” yaitu dengan mengerahkan peranan Organisasi Internasional terkait seperti FAO untuk ikut andil membantu ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya tanpa kelaparan. Hingga tanpa ada seorangpun yang mengalami kekurangan nilai gizi dan memperoleh kemudahan akses makanan dalam berkehidupan dalam jangka panjang. FAO membantu tercapainya SDGs tanpa kelaparan dengan target mengakhiri malnutrisi pada tahun 2030, menekan angka penambahan *stunting* di tingkat usia lima tahun, kemudian mengatasi kebutuhan gizi pada perempuan di tahun 2025. Peranan FAO pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dapat berjalan secara signifikan dengan menggunakan metode pengenalan dan sosialisasi kepada dunia bahwa kesuksesan yang dicita-citakan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Penduduk di negara maju sangat diperlukan peranannya dalam menjalankan berbagai program pengangkatan kelaparan dunia.

FAO memaksimalkan peranannya dalam mewujudkan SDGs nomor dua yaitu tanpa kelaparan dengan menjadi pengelola bantuan sumbangan dana kelaparan yang diberikan negara-negara maju serta dialokasikan secara tepat pada sasaran dengan menyediakan kebutuhan makanan bernilai gizi tinggi pada penduduk di negara berkembang. Kemudian memaksimalkan bantuan melalui sumber daya input lainnya seperti bantuan yang dialokasikan oleh FAO kepada Sudan Selatan yang terancam krisis pangan. Keselarasan SDG’s (*Sustainable Development Goals*) nomor dua yaitu *Zero Hunger* dengan problematika krisis pangan yang dialami oleh negara Sudan Selatan dapat menjadi sebuah jawaban bahwa penggunaan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dapat digunakan pada pengkajian bantuan FAO ke Sudan Selatan.

2.3 Hipotesa

1. Upaya yang dilakukan FAO yaitu memberi peringatan kepada Sudan Selatan terkait krisis pangan yang dihadapi Sudan Selatan.
2. FAO mengirimkan bantuan kepada Sudan Selatan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan Sudan Selatan dalam bentuk pelatihan sistem pertanian, perbaikan sistem penilaian panen sebagai data primer sektor pertanian, pengadaan sosialisasi koperasi pertanian, dan upaya transformasi *Sustainable Agriculture Programme*.

2.5 Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya untuk:

1. Untuk mengetahui lebih jauh FAO sebagai Organisasi Internasional yang menangani urusan ketahanan pangan dunia.
2. Mengukur tingkat ketahanan pangan Sudan Selatan di Era Pandemi Covid-19.
3. Mengidentifikasi upaya FAO terhadap kelaparan di Sudan Selatan sebagai Organisasi Internasional yang bergerak dalam bidang pangan dan pertanian.
4. Mengidentifikasi hambatan bantuan pangan oleh FAO di Sudan Selatan dikarenakan situasi politik dan keamanan Sudan Selatan di era Pandemi Covid-19.

1.6 Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan menggunakan data-data deskriptif, yang merupakan metode mencari serta mengumpulkan fakta-fakta berdasarkan interpretasi yang tepat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik *library research* yang bersumber dari buku, jurnal, berita nasional maupun internasional, *website*, beserta sumber-sumber lainnya.

3. Metode Penulisan

Rumusan masalah yang telah terlampir diatas akan dijawab dengan menggunakan metode penulisan deduktif, yaitu dengan memberikan penjelasan secara rinci terlebih dahulu dan nantinya akan ditarik kesimpulan di akhir penelitian.

2.1 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus yaitu kepada upaya FAO dalam mewujudkan stabilitas ketahanan pangan di Sudan Selatan. Dalam rangka mempersempit jangkauan dan batas-batas penelitian, maka penelitian ini hanya menganalisa ketahanan pangan Sudan Selatan di Era Pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021.

2.1 Rencana Sistematika

Penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Upaya FAO dalam Mewujudkan Stabilitas Ketahanan Pangan Sudan Selatan di Era Pandemi Covid-19” secara sistematis disusun menjadi tiga bab yang diantaranya yaitu:

- BAB I** Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Pada bab ini akan membahas mengenai kelangkaan pangan di Sudan Selatan yang kemudian berpotensi terjadi krisis pangan pada Era Pandemi Covid-19.
- BAB III** Pada bab ini akan membahas mengenai mengidentifikasi upaya FAO terhadap stabilitas ketahanan pangan dengan tujuan penanggulangan krisis pangan dan bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan Era Pandemi Covid-19.
- BAB IV** Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian.